

Evaluation of the Effectiveness of the Homeless and Beggars (GEPENG) Development Program at the Pekanbaru City Social Service

Evaluasi Efektivitas Program Pembinaan Gelandangan dan Pengemis (GEPENG) di Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Alvira Jihan Arista¹, Sitti Rahmah^{*2}

^{1,2}Program Studi Administrasi Negara, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

*Corresponding author's e-mail: sittra505@gmail.com

Abstract

Addressing the issue of vagrants and beggars (GEPENG) in urban areas poses a significant challenge for local governments, including the Social Service of Pekanbaru City. To tackle this problem, the Social Service of Pekanbaru City has implemented a guidance program aimed at social rehabilitation, economic empowerment, and social reintegration of vagrants and beggars. This study aims to evaluate the effectiveness of the guidance program at the Social Service of Pekanbaru City based on indicators such as the reduction in the number of vagrants and beggars, the success of social rehabilitation, skill enhancement, and its impact on the social and economic lives of the participants. The study employs a qualitative approach, using in-depth interviews, observations, and documentation for data collection. The evaluation results indicate that the guidance program has successfully reduced the number of vagrants and beggars in Pekanbaru. However, significant challenges remain in terms of program sustainability, difficulties in social reintegration, and limited resources for skill training and economic empowerment. Factors affecting the program's effectiveness include budget constraints, social stigma towards vagrants and beggars, and a lack of community support in reducing the practice of giving money to beggars on the streets. The study recommends increasing the budget, strengthening collaboration among relevant parties, and providing more intensive support for participants after the guidance program.

Keywords: Evaluation of Effectiveness, Guidance Program, Vagrants, Beggars.

Abstrak

Mengatasi masalah gelandangan dan pengemis (GEPENG) di perkotaan menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah, termasuk Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Untuk menghadapi masalah ini, Dinas Sosial Kota Pekanbaru telah melaksanakan program pembinaan yang bertujuan untuk rehabilitasi sosial, pemberdayaan ekonomi, dan reintegrasi sosial bagi gelandangan dan pengemis. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program pembinaan di Dinas Sosial Kota Pekanbaru berdasarkan indikator seperti penurunan jumlah gelandangan dan pengemis, keberhasilan rehabilitasi sosial, peningkatan keterampilan, dan dampaknya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi peserta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa program pembinaan telah berhasil menurunkan jumlah gelandangan dan pengemis di Pekanbaru. Namun, tantangan besar masih ada terkait keberlanjutan program, kesulitan dalam reintegrasi sosial, dan keterbatasan sumber daya untuk pelatihan keterampilan serta pemberdayaan ekonomi. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program antara lain keterbatasan anggaran, stigma sosial terhadap gelandangan dan pengemis, serta kurangnya dukungan masyarakat dalam mengurangi praktik memberi uang kepada pengemis di jalanan. Rekomendasi dari penelitian ini meliputi peningkatan anggaran, penguatan kolaborasi antara pihak terkait, serta program pendampingan yang lebih intensif bagi peserta setelah pembinaan.

Kata Kunci: Evaluasi Efektivitas, Program Pembinaan, Gelandangan, Pengemis.

PENDAHULUAN

Persoalan sosial adalah konflik yang sering timbul dalam kehidupan di masyarakat. Permasalahan sosial ini juga adalah fenomena yang mempunyai banyak sekali dimensi. Oleh sebab itu, pada saat ini problem sosial banyak kalangan yang mengkaji, melihat dari sudut pandang dimensi yang sangat majemuk. Biasanya dilema sosial diartikan menjadi sebagian besar masyarakat tidak menginginkan kondisi ini. Permasalahan sosial artinya persoalan spesifik yang dihadapi individu atau rakyat yaitu persoalan kemiskinan. Suatu masyarakat dan individu juga menghadapi banyak sekali problem. Mulai dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah, minimnya Sumber Daya Alam (SDA) bahkan tidak memungkinkan untuk dikembangkan, akses yang tidak dimiliki dan memperoleh sumber ekonomi, dan faktor sistem politik. Mengenai data kemiskinan yang ada Di Kota/Kabupaten Provinsi Riau.

Kota Pekanbaru merupakan kota terbesar baik dari segi geografis mau pun dari segi perekonomian yang merupakan kota perdagangan dan jasa, termasuk sebagai Kota dengan tingkat pertumbuhan, urbanisasi, dan migrasi yang relatif tinggi. Luas wilayah Kota Pekanbaru sebesar 632,26 km² atau 0,71 % dari total luas wilayah Provinsi Riau, terdiri dari 12 kecamatan dan 63 kelurahan.

Kemiskinan di Kota Pekanbaru berpotensi ke Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang terjadi seperti Gelandangan dan pengemis (Gepeng) yang sejak dulu ada di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah telah mengambil sikap jelas terhadap masalah sosial Gelandang dan pengemis ini. Gelandangan dan pengemis memang sudah menjadi permasalahan nasional yang ada di berbagai Kota, termasuk juga di negara maju. Masalah gelandangan dan pengemis ini sementara sudah lama mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah maupun pusat, hingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Bahkan secara ekstrem gelandangan dan pengemis diibaratkan sebagai penyakit yang di derita oleh suatu kota, karena keberadaannya yang mengganggu keindahan dan kenyamanan kota.

Persoalan sosial merupakan konflik yang sering timbul dan memiliki banyak dimensi. Oleh karena itu, banyak pihak yang mengkaji masalah sosial dari sudut pandang yang sangat beragam. Biasanya, dilema sosial diartikan sebagai kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar masyarakat, seperti kemiskinan. Masyarakat dan individu menghadapi banyak masalah, mulai dari rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM), minimnya Sumber Daya Alam (SDA) yang tidak memungkinkan untuk dikembangkan, kurangnya akses terhadap sumber ekonomi, hingga faktor sistem politik. Di Kota Pekanbaru, yang merupakan kota terbesar di Provinsi Riau dari segi geografis dan ekonomi serta kota perdagangan dan jasa dengan tingkat pertumbuhan, urbanisasi, dan migrasi yang relatif tinggi, luas wilayahnya mencapai 632,26 km² dengan 12 kecamatan dan 63 kelurahan. Kemiskinan di Kota Pekanbaru berpotensi menyebabkan masalah kesejahteraan sosial seperti gelandangan dan pengemis (Gepeng) yang telah lama ada di masyarakat. Pemerintah telah mengambil sikap jelas terhadap masalah sosial ini, yang menjadi masalah nasional di berbagai kota, termasuk di negara maju. Masalah gelandangan dan pengemis ini telah lama mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah maupun pusat, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), karena keberadaannya dianggap mengganggu keindahan dan kenyamanan kota.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 BAB III pasal 26 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Daerah Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar pada SPM bidang sosial terdiri dari: rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial, rehabilitasi sosial bagi anak terlantar di luar panti sosial, rehabilitasi sosial bagi lanjut usia terlantar di luar panti sosial, rehabilitasi sosial bagi tunasusila khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat korban bencana di daerah Kabupaten/Kota.

Dinas Sosial dan pemerintah daerah dalam pelaksanaannya memiliki kebijakan baru terkait masalah gelandangan dan pengemis sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018. Meskipun pembinaan dilakukan di luar panti, Dinas Sosial Pekanbaru saat ini memanfaatkan keberadaan rumah singgah (shelter) untuk memenuhi kebutuhan dasar gelandangan dan pengemis. Kebijakan pemerintah dalam penanganan masalah gelandangan dan pengemis telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 pasal 2, yang meliputi upaya preventif, represif, dan rehabilitatif. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya gelandangan dan pengemis, memperkecil pengaruh yang ditimbulkan, serta membantu mereka mencapai taraf hidup yang layak dan mengembangkan potensi diri untuk hidup normal dalam masyarakat.

Terkait penanggulangan gelandangan dan pengemis, dalam rangka pemulihan mereka diperlukan pembinaan dan pendidikan agar dapat berfungsi secara sosial dan ekonomi. Pembinaan diharapkan mampu memberikan alternatif solusi bagi permasalahan atau tantangan yang dihadapi pada masa mendatang (Najah & Hastuti, 2024). Rehabilitasi dilakukan melalui Program Pembinaan Dinas Kota Pekanbaru. Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia melalui Ditjen Rehabilitasi Sosial, khususnya Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang (RSTSKPO), melakukan upaya berkesinambungan untuk mengatasi gelandangan dan pengemis (Gepeng). Salah satu upayanya adalah memberdayakan gelandangan dan pengemis melalui program-program pembinaan, seperti Program Pemberdayaan Fakir Miskin, pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, pembinaan anak terlantar, pembinaan penyandang cacat dan trauma, pembinaan panti asuhan atau panti jompo, pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial, serta pembinaan eks penyandang penyakit sosial.

Kota Pekanbaru sebagai Ibukota Provinsi Riau, banyak orang datang untuk mencari pekerjaan dan penghasilan. Namun, peluang kerja terbatas, terutama bagi mereka yang tidak memiliki keterampilan atau keahlian tertentu, sehingga banyak yang berakhir menjadi gelandangan dan pengemis. Penulis mengamati bahwa hampir di setiap tempat, banyak gelandangan dan pengemis yang terus berdatangan. Meskipun Dinas Sosial Kota Pekanbaru telah bekerja keras, jumlah gelandangan dan pengemis masih belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Setiap tahunnya, jumlah mereka meningkat, yang berpotensi mengganggu keamanan dan stabilitas pembangunan di Kota Pekanbaru. Visi dan misi Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah menciptakan kemandirian bagi gelandangan dan pengemis dalam kehidupan mereka.

Beberapa bentuk kegiatan bimbingan dan pelatihan keterampilan yang telah dilakukan Dinas Sosial Kota Pekanbaru, banyak gelandangan dan pengemis yang mengikuti kegiatan pembinaan dari tahun 2019 sampai dengan 2023. Kegiatan tersebut meliputi bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan dengan jumlah peserta yang bervariasi setiap tahunnya. Misalnya, pada tahun 2019, ada 10 peserta yang mengikuti bimbingan sosial dengan dana kegiatan sebesar Rp. 99.710.000 yang bersumber dari APBD. Program ini bertujuan untuk memulihkan fungsi sosial gelandangan dan pengemis, agar mereka bisa berfungsi kembali dalam masyarakat secara normal dan mencari pendapatan yang sesuai dengan norma sosial.

Keberhasilan program pembinaan ini dapat diukur dari perubahan yang dialami oleh gelandangan dan pengemis setelah mengikuti pelatihan. Namun, masih banyak yang kembali ke jalan karena berbagai alasan. Untuk mengatasi masalah ini, penanganan dilakukan melalui program preventif, represif, dan rehabilitatif, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009. Pemerintah dan negara berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui program-program pembangunan sosial. Dengan demikian, gelandangan dan pengemis dapat kembali beraktivitas seperti masyarakat pada umumnya dan mengurangi gangguan terhadap stabilitas pembangunan di Kota Pekanbaru.

Dinas Sosial Kota Pekanbaru memiliki tiga program utama, yaitu Preventif, Refresif, dan Rehabilitatif, untuk menangani gelandangan dan pengemis. Namun, dalam praktiknya, beberapa fenomena masih ditemukan terkait pembinaan dan pelatihan keterampilan bagi kelompok ini. Salah satunya adalah kurangnya tempat khusus untuk mendukung proses rehabilitasi sosial, yang masih dilakukan di shelter atau rumah singgah sementara. Selain itu, meskipun sudah ada upaya untuk memulai rehabilitasi sosial sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008, proses ini masih belum maksimal dan terbatas pada beberapa jenis kegiatan seperti penyuluhan, pelatihan, dan pendidikan.

Meningkatnya jumlah gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru telah menyebabkan gangguan terhadap ketertiban umum, terutama di area-area tertentu seperti persimpangan jalan. Program pembinaan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial juga terbilang monoton, dan masih banyak gelandangan serta pengemis yang belum dapat mengikuti program tersebut. Selain itu, permasalahan sosial terkait kesejahteraan masih belum optimal, dan fasilitas pendukung seperti shelter atau tempat penampungan sementara masih terbatas. Hal ini menunjukkan pentingnya perbaikan kebijakan serta penambahan sumber daya untuk mendukung keberhasilan program rehabilitasi sosial di Kota Pekanbaru.

Dinas Sosial Kota Pekanbaru telah melaksanakan berbagai program pembinaan untuk gelandangan dan pengemis, namun belum ada evaluasi menyeluruh untuk mengukur efektivitas program tersebut. Program ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dievaluasi lebih lanjut, dengan tujuan untuk memastikan sinkronisasi antara tujuan program dan implementasinya. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait pembinaan yang diberikan oleh Dinas Sosial Pekanbaru, dengan fokus pada evaluasi efektivitas program pembinaan untuk meningkatkan kehidupan gelandangan dan pengemis, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program tersebut.

METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang dijelaskan secara deskriptif untuk menggambarkan fenomena sosial secara detail serta menyajikan gambaran lengkap mengenai setting dan hubungan-hubungan yang terdapat dalam penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat dan langsung ke lokasi penelitian yang dilaksanakan di Kantor Dinas Sosial Kota Pekanbaru, tepatnya di Jalan Datuik Setia Maharaja No. 6, Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau. Data penelitian bersumber dari data primer dan sekunder (Siyoto, 2015). Adapun teknik untuk mengumpulkan data tersebut yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi (Sugiyanto, 2016). Subjek penelitian atau responden dalam penelitian dipilih melalui teknik purposive sampling. Teknik analisis data dilakukan (Maleong, 2006) dengan cara pengumpulan data, pengolahan data dan pengambilan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Efektivitas Pembinaan Gelandangan dan Pengemis Di Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Pembinaan adalah proses pembelajaran untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang belum dimiliki, dengan tujuan membantu individu agar lebih efektif dalam mencapai tujuan hidup dan kerja. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam kondisi tidak sesuai dengan norma masyarakat, tidak memiliki tempat tinggal atau pekerjaan tetap, dan hidup berpindah-pindah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat Program Pembinaan Gelandangan dan Pengemis (Geiping) pada Dinas Sosial Kota Pekanbaru, dengan menggunakan indikator penelitian berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Kota Pekanbaru, yang mencakup pendekatan preventif, refresif, dan rehabilitatif.

Preventif

Pemerintah Kota Pekanbaru mengatasi masalah gelandangan dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1980 yang mengatur langkah-langkah penanggulangan gelandangan dan pengemis. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain melalui tindakan preventif, seperti penyuluhan, bimbingan sosial, pendidikan, pelatihan, serta bantuan sosial. Tujuan utamanya adalah mencegah munculnya gelandangan dan pengemis dengan cara memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak memberikan bantuan secara sembarangan yang dapat memperburuk masalah sosial ini. Penyuluhan dilakukan melalui berbagai saluran seperti media cetak, televisi, dan internet, serta menggunakan mobil Dinas Sosial yang dilengkapi dengan pengeras suara di berbagai lokasi strategis seperti sekolah, panti sosial, dan tempat umum.

Hasil wawancara dengan masyarakat Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa meskipun mereka pernah mendengar tentang larangan memberi bantuan kepada gelandangan dan pengemis, pemahaman tentang sanksi yang dikenakan masih minim. Beberapa warga mengaku memberikan bantuan karena kasihan melihat kondisi mereka, seperti anak-anak yang menjual koran. Meskipun sudah ada himbauan dari Dinas Sosial, banyak masyarakat yang mengetahui informasi ini melalui

media, bukan langsung dari pihak Dinas Sosial. Oleh karena itu, Dinas Sosial diharapkan lebih intens memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang larangan dan sanksi yang berlaku untuk mengatasi masalah gelandangan dan pengemis di kota ini.

Dinas Sosial Kota Pekanbaru memberikan berbagai himbauan kepada masyarakat terkait larangan memberi sumbangan kepada gelandangan dan pengemis, baik di jalanan maupun langsung ke rumah. Masyarakat sebagian besar belum mengetahui bahwa memberikan sumbangan tersebut dilarang dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008. Dinas Sosial menggunakan berbagai media untuk menyebarkan informasi, seperti mobil dengan pengeras suara, brosur, dan spanduk di persimpangan lampu merah dan tempat lainnya. Meskipun demikian, sebagian besar warga tidak menyadari adanya larangan ini, dan belum menerima informasi langsung dari Dinas Sosial.

Dinas Sosial Kota Pekanbaru juga melaksanakan program rehabilitasi sosial bagi gelandangan dan pengemis dengan tujuan mengurangi jumlah mereka di kota ini. Program ini mencakup pemberian pelatihan keterampilan dan bimbingan mental, fisik, dan sosial. Dalam kegiatan ini, peserta diberikan keterampilan praktis seperti menjahit dan kerajinan tangan, serta bimbingan tentang pola hidup sehat dan tanggung jawab sosial. Meskipun sudah ada upaya yang maksimal dari Dinas Sosial, masih ada tantangan dalam memastikan keberhasilan rehabilitasi dan reintegrasi sosial mereka ke masyarakat.

Bantuan sosial (bansos) adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat untuk melindungi dari risiko sosial dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Bantuan ini dapat berasal dari pemerintah atau lembaga lainnya, termasuk lembaga non-pemerintah di bidang pendidikan dan keagamaan. Bantuan sosial bisa bersifat langsung atau melalui lembaga, dengan syarat tertentu atau tanpa syarat, dan bisa berbentuk uang atau barang. Dinas Sosial Kota Pekanbaru mendapatkan bantuan sosial untuk para gelandangan dan pengemis dari Pemerintah Kota, Kementerian Sosial, serta lembaga lain seperti Lazismu, yang memudahkan distribusi bantuan dan pemberian pembinaan yang lebih baik bagi mereka.

Represif

Usaha reipresif adalah upaya yang terorganisir untuk mengurangi atau menghilangkan masalah gelandangan dan pengemis di masyarakat, dengan tujuan mencegah berulangnya masalah tersebut. Usaha ini dilakukan melalui lembaga atau organisasi yang memiliki misi sosial untuk mengatasi permasalahan tersebut secara menyeluruh, baik untuk individu maupun kelompok.

Salah satu tindakan yang dilakukan dalam mengatasi masalah gelandangan dan pengemis adalah razia. Dinas Sosial Kota Pekanbaru, bekerja sama dengan Satpol PP dan Kepolisian, melakukan razia untuk menindak pelanggaran terhadap peraturan daerah terkait gelandangan dan pengemis. Hasil razia tersebut kemudian diserahkan kepada Dinas Sosial untuk dilakukan pembinaan, dengan tujuan agar mereka tidak kembali ke jalanan. Razia dilakukan secara rutin berdasarkan jadwal atau laporan masyarakat, serta dapat dilakukan bersama dengan pihak lain, seperti kepolisian atau

organisasi pemerintah daerah lainnya. Modus para gelandangan dan pengemis beragam, seperti meminta uang dengan alasan kasihan atau menjual barang, namun tetap ditindak tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Anak Dinas Sosial Kota Pekanbaru, diketahui bahwa sanksi terhadap gelandangan dan pengemis yang terjaring razia oleh Satpol PP Kota Pekanbaru umumnya tidak ada. Mereka hanya ditahan sementara selama kurang lebih 1x24 jam oleh Satpol PP untuk memberikan "shock therapy" dan pengarahan. Setelah itu, mereka diserahkan kembali kepada Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk tindakan lanjut. Sanksi yang diterapkan lebih bersifat pembinaan, dengan tujuan agar mereka dapat memahami dampak dari perbuatan mereka dan tidak kembali ke jalanan. Penampungan sementara ini diharapkan memberikan efek jera kepada gelandangan dan pengemis yang terjaring razia.

Rehabilitatif

Usaha rehabilitatif melibatkan serangkaian kegiatan yang terorganisir untuk membantu pemulihan, seperti pelatihan, pendidikan, dan pemilihan kemampuan untuk memfasilitasi reintegrasi individu ke dalam masyarakat. Program ini bertujuan agar para gelandangan dan pengemis dapat memperoleh keterampilan untuk hidup dengan layak, sesuai dengan martabat manusia sebagai warga negara Indonesia. Salah satu upaya rehabilitatif yang dilakukan adalah dengan menyediakan shelter atau rumah singgah, yang berfungsi untuk menampung dan memberikan bantuan kepada para PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang terjaring razia. Di shelter ini, mereka mendapatkan pembinaan mental, meskipun terbatas pada waktu tinggal hanya 3 hingga 7 hari, sesuai dengan SOP yang berlaku.

Namun, shelter yang dikelola oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru masih menghadapi sejumlah kekurangan, seperti terbatasnya jumlah ruang yang ada, hanya mampu menampung 15-20 orang saja. Selain itu, kurangnya fasilitas seperti sarana dan prasarana menjadi kendala dalam memberikan layanan yang optimal. Meski demikian, para penghuni shelter mendapatkan jadwal kegiatan seperti olahraga, sholat, serta pembinaan oleh pekerja sosial profesional. Proses seleksi dilakukan dengan mengidentifikasi kriteria usia dan kondisi fisik, psikis, serta sosial, dan taha Hasil wawancara menunjukkan bahwa beberapa pengemis dan gelandangan di Kota Pekanbaru tidak menerima pembinaan dari Dinas Sosial. Mereka mengaku hanya dipulangkan ke rumah tanpa adanya dukungan lanjutan. Sebagai contoh, seorang pengemis mengungkapkan bahwa dia tidak pernah menerima bantuan atau pembinaan, dan kembali ke jalan karena terpaksa mencari nafkah untuk keluarganya. Seorang gelandangan lainnya menyatakan bahwa meskipun dia pernah ditahan oleh Satpol PP dan Dinas Sosial, dia tetap kembali ke jalan karena membutuhkan uang untuk hidup.

Wawancara lebih lanjut dengan beberapa gelandangan lainnya mengungkapkan bahwa mereka tidak pernah mendapatkan bantuan sosial atau pembinaan dari Dinas Sosial, dan mereka terus tinggal di jalanan atau tempat perlindungan sementara tanpa ada upaya rehabilitasi. Berdasarkan temuan ini, peneliti menyimpulkan bahwa pembinaan yang diberikan Dinas Sosial Kota

Pekanbaru belum efektif, terutama dalam menciptakan perubahan yang berarti bagi para pengemis dan gelandangan. Diperlukan koordinasi yang lebih baik dan program yang lebih berkelanjutan untuk membantu mereka, termasuk pelatihan keterampilan dan pembinaan yang dapat mengurangi ketergantungan pada kegiatan mengemis atau menggelandang. p seleksi ini dilaksanakan setiap hari atau sesuai aduan dari masyarakat.

Hambatan Program Pembinaan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Dinas Sosial Kota Pekanbaru telah melakukan berbagai upaya dalam pembinaan gelandangan dan pengemis, namun tantangan dalam implementasinya masih besar. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya informasi dan sosialisasi yang efektif kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 12 Tahun 2008 terkait ketertiban sosial. Akibatnya, masyarakat masih memberi sumbangan kepada gelandangan dan pengemis, yang justru melanggar peraturan tersebut. Selain itu, banyak gelandangan dan pengemis yang belum menerima pembinaan yang maksimal dari Dinas Sosial. Dalam program preventif, rehabilitatif, dan reintegratif, beberapa kendala seperti kurangnya sumber daya manusia dan anggaran juga menghambat keberhasilan pembinaan.

Selain itu, meskipun ada upaya rehabilitatif melalui rumah singgah, masalah seperti keterbatasan fasilitas dan anggaran membuat program ini tidak dapat berjalan optimal. Pembinaan yang diterapkan juga belum efektif dalam mengubah perilaku gelandangan dan pengemis, karena banyak yang kembali ke jalanan meskipun sudah menjalani pembinaan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada berbagai inisiatif dari Dinas Sosial, masih banyak faktor eksternal dan internal yang perlu diperbaiki agar pembinaan dapat berjalan dengan lebih efektif dan memberikan dampak positif yang nyata bagi gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Program Pembinaan Gelandangan dan Pengemis (Gipeng) di Dinas Sosial Kota Pekanbaru, dapat disimpulkan bahwa meskipun pemerintah Kota Pekanbaru telah melakukan pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis, pelaksanaannya masih belum maksimal. Hambatan yang dihadapi termasuk kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai larangan memberi sumbangan kepada gelandangan dan pengemis, serta kurangnya penegakan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2008 tentang ketertiban sosial. Selain itu, program pembinaan yang meliputi preventif, reaktif, dan rehabilitatif juga terhambat oleh kurangnya tindakan yang tegas terhadap gelandangan dan pengemis yang melanggar peraturan, serta ketidakmampuan pemerintah kota dalam menyediakan fasilitas permanen untuk pembinaan mereka.

REFERENSI

Ardiansyah,dkk. Konsep Hadis Tentang Meminta-Minta. UIN Sumatera Utara, Medan
Ayunda, R., Disemadi, H. S., & Wijaya, R. (2020). Kebijakan Kawasan Bebas Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Batam: Suatu Kajian Hukum Perspektif

- SDGs. Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, 3(3) <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/32876/17723>
- Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial. 2005. Standar Pelayanan Minimal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis. Jakarta : Departemen Sosial RI.
- Dunn, William N. 2003. Analisa Kebijakan Publik. Yogyakarta: PT. Prasetia Widia Pratama
- Fadri, Z. (2019). Upaya Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis (Gepeng) Sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Di Yogyakarta. KOMUNITAS, 10(1 SE-Articles), 1–19. <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1070>
- Harun, T. (2018). Upaya Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar (Perda Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis). 3(2). <https://ojs.uniskabjm.ac.id/index.php/Asy/article/download/2086/1721>
- Hutauruk, R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Gelandangan Dan Pengemis di Kota Batam Sebagai Akibat Implementasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Sosial Ketertiban. 6(3).
- Khairunnisa, T., Purnomo, E. P., & Salsabila3, L. (2020). Upaya Rehabilitasi dan Preventif Pengemis dan Gelandangan Di Kota Yogyakarta. Jurnal Moderat, 6(1). <https://ip.umy.ac.id/wp-content/uploads/2020/04/3156-11620-1-PB.pdf>
- Mathis. (2002). Pembinaan Dalam Pembentukan Perilaku. Jakarta: Gaung Persada.
- Mila Khasanah (2020). Penegakan Hukum Pemerintahan Tentang Ketertiban Sosial (Gelandangan dan Pengemis) di Kota Pekanbaru. Universitas Riau. FISIP. Vol 7
- Mutaqin, Z. (2021). Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis (Studi Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010) Studi di Dinas Sosial Kota Serang Banten. UIN SMH Banten.
- Muslim (2014). Penanggulangan Pengemis dan Gelandangan di Kota Pekanbaru. UIN SUSKA RIAU.
- Najah, D. M., & Hastuti, W. P. (2024). Implementasi Program Pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Al-manar Journal of Public Administration and Management*, 1(1), 13–25. <https://journal.al-manarpublisher.com/index.php/AJPAM/article/download/40/36>
- Nindya Khasna A, Tri Yuniningsih, Ida Hayu D. Evaluasi Program penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis (GEPENG) di Kabupaten Demak. Universitas Diponegoro. Hlm 8.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial. <https://pustaka.pekanbaru.go.id/inlislite3/opac/detail-opac?id=3262>
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak,. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/121239/PERMENSOS_21_TAHUN_2013.pdf
- Putri Maulina. Evaluasi Program Pembinaan Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Mengurangi Gelandangan dan Pengemis di Kota Banda Aceh. UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh.

Yuki Deli A.M (2014). Efektivitas Pembinaan dan Pelatihan Gelandangan dan Pengemis Oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. Universitas Riau. FISIP. Vol 2